

EVALUASI PROGRAM BANYUMAS SEJAHTERA SEBAGAI BENTUK LOKALISASI NORMA GLOBAL DALAM REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN

¹Fitri Adi Setyorini

²Rifka Amalia

³M. Aris Pujiyanto

Universitas Jenderal Soedirman

fitri.adi@unsoed.ac.id

Abstract : *The mobility of migrant workers is a global phenomenon that not only affects receiving countries but also poses significant challenges for sending countries, particularly regarding social and economic reintegration upon return. Banyumas Regency is one of the migrant-sending areas in Indonesia that faces similar problems. The Banyumas Sejahtera Program emerged as a local government initiative to support the reintegration of migrant workers through skills training, economic assistance, and social mentoring. This study aims to evaluate the effectiveness of the Banyumas Sejahtera Program as a form of localization of global norms in migrant reintegration policy. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of program implementation. The findings indicate that the program has reached the majority of returning migrant workers, particularly those in the procedural category, through community-based socio-economic interventions. Nevertheless, several challenges persist, including limited resources, low participation of non-procedural migrants, and the absence of evaluation frameworks grounded in international norms. Conceptually, the program reflects the process of localizing global norms such as safe and dignified return and sustainable reintegration, as stipulated in the Global Compact for Migration and SDG 10.7. This study contributes to the field of International Relations by highlighting the dynamics of translating global norms into local policy practices and underlining the importance of strengthening the role of local governments in the governance of transnational migration.*

Keywords: *Banyumas Sejahtera, Global Norms, Localization, Migrant Reintegration, Policy Evaluation*

Abstrak; Mobilitas pekerja migran merupakan fenomena global yang tidak hanya berdampak pada negara penerima, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi negara asal, terutama dalam hal reintegration sosial dan ekonomi pasca-kepulangan. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kantong migran asal Indonesia yang menghadapi problematika serupa. Program Banyumas Sejahtera hadir sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk mendukung reintegration pekerja migran melalui pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, dan pendampingan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Banyumas Sejahtera sebagai bentuk lokalisasi norma global dalam kebijakan reintegration pekerja migran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau sebagian besar pekerja migran yang kembali, terutama kelompok prosedural, melalui intervensi sosial-ekonomi berbasis komunitas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi migran non-prosedural, dan kurangnya kerangka evaluasi berbasis norma internasional. Secara konseptual, program ini mencerminkan proses lokalisasi norma global seperti *safe and dignified return* dan reintegration berkelanjutan sebagaimana diatur dalam *Global Compact for Migration* dan SDG 10.7. Studi ini

berkontribusi pada kajian Hubungan Internasional dengan menyoroti dinamika penerjemahan norma global ke dalam praktik kebijakan lokal, serta pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam tata kelola migrasi transnasional.

Kata Kunci: Banyumas Sejahtera, Evaluasi Kebijakan, Lokalisasi, Norma Global, Reintegrasi Migran

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja migran internasional telah menjadi isu global yang kompleks seiring meningkatnya arus globalisasi dan ketimpangan distribusi tenaga kerja antarnegara. Migrasi tenaga kerja tidak hanya berdampak pada perekonomian negara tujuan, tetapi juga membawa implikasi besar terhadap dinamika sosial dan ekonomi di negara asal. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia memiliki peran signifikan dalam ekonomi migrasi global, termasuk melalui remitansi yang berdampak pada pembangunan lokal (ILO, 2024). Para pekerja migran menjadi aktor transnasional yang menjembatani interaksi antarlevel global dan lokal dalam arus tenaga kerja dan kebijakan migrasi (Levitt & Schiller, 2020). Dengan demikian, kebijakan terkait pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari kerangka tata kelola migrasi internasional yang menuntut integrasi antara norma global dan respons lokal.

Di tingkat lokal, reintegrasi pasca-kepulangan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan komunitas asal pekerja migran. Setelah bekerja di luar negeri, para migran kerap menghadapi kesulitan dalam beradaptasi kembali secara sosial, psikologis, dan ekonomi (Setiadi, 2021). Tantangan tersebut mencakup keterbatasan lapangan kerja yang sesuai, ketimpangan keterampilan, stigma sosial, dan tekanan ekonomi dari keluarga. Dalam beberapa kasus, pekerja migran mengalami marginalisasi dan keterasingan karena ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dan realitas yang mereka bawa pulang (Wuryandari, 2022). Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi reintegrasi sosial yang dirancang secara sistematis untuk mendukung transisi pekerja migran kembali ke komunitas asal.

Salah satu bentuk respons terhadap tantangan tersebut adalah Program Banyumas Sejahtera, sebuah inisiatif Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung reintegrasi pekerja migran. Program ini dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas yang mencakup pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, serta pendampingan psikososial. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai aktor lokal seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, Baznas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja migran pasca-kepulangan serta mengurangi risiko eksklusi sosial (Wati, 2023). Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, minimnya data pekerja migran non-prosedural, dan rendahnya partisipasi akibat kurangnya sosialisasi program.

Program Banyumas Sejahtera tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas, yakni tata kelola migrasi global, khususnya norma internasional tentang reintegrasi yang diatur dalam Global Compact for Migration (GCM) dan Sustainable Development Goals (SDG) 10.7. Dalam konteks ini, program tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses *lokalisasi norma global*, yaitu adaptasi nilai dan prinsip internasional ke dalam kebijakan lokal yang kontekstual (Acharya, 2016). Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam memediasi norma global ke dalam praktik lokal yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas program lokal seperti Banyumas Sejahtera tidak hanya relevan dalam konteks kebijakan sosial, tetapi juga dalam studi hubungan internasional yang menyoroti dinamika normatif global-lokal. Hal ini membuka ruang kajian yang

menghubungkan migrasi internasional, kebijakan publik daerah, dan lokalisasi norma dalam kerangka teoritis yang lebih luas.

Secara global, norma-norma reintegrasi migran telah dirumuskan dalam *Global Compact for Migration* (GCM), khususnya pada *Objective 21* yang menyerukan reintegrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan. GCM ini juga memperkuat target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 10.7 tentang migrasi yang tertib dan bertanggung jawab. Dalam kajian hubungan internasional, proses adaptasi norma global ke dalam kebijakan lokal disebut sebagai *norm localization* (Acharya, 2016), yaitu ketika aktor lokal seperti pemerintah daerah menyesuaikan prinsip-prinsip global dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang spesifik. Dengan demikian, Program Banyumas Sejahtera dapat dilihat sebagai bentuk lokalisasi norma global dalam konteks reintegrasi pekerja migran di level subnasional. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur migrasi di Indonesia, yang masih minim mengkaji bagaimana norma global diterjemahkan dalam kebijakan daerah secara konkret.

Untuk menganalisis efektivitas program tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik dengan kerangka *Input–Process–Output–Outcome* (IPOO). Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap bagaimana sumber daya dialokasikan (*input*), bagaimana proses dijalankan oleh aktor pelaksana, apa hasil antara (*output*) yang dicapai, dan bagaimana dampaknya (*outcome*) terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi migran purna. Kerangka ini penting untuk memahami apakah adaptasi kebijakan lokal benar-benar merefleksikan norma global atau hanya bersifat simbolik. Penilaian efektivitas juga mempertimbangkan aspek efisiensi dan keberlanjutan program dalam konteks kapasitas daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas Program Banyumas Sejahtera dalam mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi pekerja migran di Kabupaten Banyumas? dan kedua, sejauh mana program ini mencerminkan proses lokalisasi norma global dalam kebijakan reintegrasi? Dua pertanyaan ini menjadi pijakan untuk mengeksplorasi desain program, aktor pelaksana, mekanisme implementasi, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip tata kelola migrasi internasional. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi efektivitas program juga akan ditinjau dari aspek partisipasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik terhadap capaian dan tantangan program yang sedang berlangsung di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika implementasi dan persepsi aktor lokal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi serta menguji kesesuaian antara pelaksanaan program dan prinsip global yang menjadi rujukan. Dengan menempatkan aktor lokal sebagai subjek utama, penelitian ini juga memperhatikan konteks sosial dan budaya yang membentuk keberhasilan atau kegagalan kebijakan reintegrasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif bagi pembuat kebijakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap lokalisasi norma global dalam praktik kebijakan migrasi di tingkat subnasional, yang masih jarang dibahas dalam literatur kebijakan migrasi di Indonesia. Sementara sebagian besar studi cenderung menekankan aspek makro seperti remitansi atau perlindungan migran di luar negeri, studi ini menyoroti dinamika

pasca-kembali dan peran strategis pemerintah daerah. Selain itu, studi ini mengintegrasikan pendekatan teori hubungan internasional, khususnya *norm localization* dalam analisis kebijakan domestik. Hal ini memberikan kontribusi konseptual bagi studi HI yang mengaitkan isu global dengan praktik lokal melalui kerangka tata kelola migrasi transnasional (Hollifield et al., 2022). Dengan kata lain, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan internasional tidak hanya terjadi di antara negara, tetapi juga melibatkan aktor lokal dalam penerjemahan norma-norma global.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Program Banyumas Sejahtera sebagai bentuk lokalisasi norma global dalam kebijakan reintegration pekerja migran di Kabupaten Banyumas. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas program dan tata kelola migrasi di tingkat lokal. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur hubungan internasional, khususnya kajian tentang *norm localization* dan *global-local policy interaction*. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik serta memberikan dasar empiris bagi pembuatan kebijakan, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk merumuskan program reintegration yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi jembatan antara agenda global dan kebutuhan lokal dalam pembangunan kebijakan migrasi yang responsif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam efektivitas Program Banyumas Sejahtera dalam mendukung reintegration sosial-ekonomi pekerja migran di Kabupaten Banyumas. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis konteks kebijakan lokal dalam hubungannya dengan norma global secara lebih rinci dan kontekstual (Yin, 2018). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan keberadaan program reintegration yang telah berjalan dan dapat dianalisis dari berbagai aspek implementasi. Fokus penelitian adalah pada aktor, proses, dan dampak kebijakan terhadap pekerja migran purna.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang mencakup perwakilan pemerintah daerah (Dinas Tenaga Kerja, Bappeda), Baznas, organisasi masyarakat sipil, serta pekerja migran prosedural dan non-prosedural. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan atau penerimaan manfaat dari program (Wickramasekara, 2019). Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen resmi pemerintah, laporan program, serta kajian literatur terkait kebijakan reintegration sosial (ILO, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses dan capaian Program Banyumas Sejahtera.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen kebijakan. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program. Observasi dilakukan selama kegiatan pendampingan dan pelatihan untuk memahami konteks sosial dari program reintegration (Creswell & Creswell, 2017). Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan daerah, laporan tahunan, serta materi pelatihan yang digunakan dalam program. Kombinasi teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas data dan memperkuat basis analisis.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam narasi dan praktik reintegration (Wagle, 2024). Penelitian ini juga menerapkan kerangka evaluasi

kebijakan publik *Input–Process–Output–Outcome* (IPOO) untuk menilai efektivitas program dari sisi sumber daya, pelaksanaan, hasil antara, dan dampak jangka panjang (Aini, 2024). Pendekatan ini relevan untuk memahami sejauh mana program lokal mencerminkan norma global tentang reintegrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan (Cholewinski, 2015). Analisis juga mencakup identifikasi hambatan struktural dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan program. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun model kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta validasi melalui *member checking* kepada informan kunci (Zhang & Chung, 2024). Keabsahan interpretasi data diperkuat dengan melakukan diskusi hasil temuan dengan akademisi dan praktisi kebijakan di tingkat lokal. Aspek etika penelitian diperhatikan melalui pemberian *informed consent*, jaminan kerahasiaan identitas informan, serta perlakuan adil dan hormat terhadap narasumber. Peneliti juga memastikan bahwa proses wawancara dan observasi dilakukan secara sukarela tanpa tekanan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjaga integritas ilmiah dan sensitivitas terhadap konteks sosial yang dikaji.

PEMBAHASAN

Program Banyumas Sejahtera

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja internasional yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 10.000 warga sebagai pekerja migran, dengan dominasi perempuan berusia produktif (BP3MI Jawa Tengah, 2024). Negara tujuan utama meliputi Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong, dengan sektor pekerjaan terbesar adalah domestik, pertanian, dan perawatan lansia. Tingginya angka migrasi ini tidak hanya didorong oleh minimnya lapangan kerja lokal, tetapi juga oleh jaringan sosial dan praktik migrasi turun-temurun dalam komunitas pedesaan (Wicaksono, 2019).

Program Banyumas Sejahtera merupakan inisiatif kebijakan lokal yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk merespons kebutuhan reintegrasi sosial dan ekonomi para pekerja migran purna. Program Banyumas Sejahtera menjadi upaya yang sistematis untuk mendukung reintegrasi yang lebih inklusif dan bermartabat. Program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pekerja migran yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi setelah kembali dari luar negeri, baik secara psikologis, ekonomi, maupun sosial. sebagian pekerja migran berasal dari jalur non-prosedural, yang meningkatkan risiko kerentanan selama proses migrasi dan kepulangan. Setelah kembali ke tanah air, para pekerja ini menghadapi tantangan reintegrasi yang kompleks, baik secara sosial maupun ekonomi, karena ketidaksesuaian keterampilan, stigma sosial, dan tekanan keluarga (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Tujuan utama dari Program Banyumas Sejahtera adalah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial pekerja migran setelah kepulangan. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap pelatihan kerja, peluang usaha, serta dukungan sosial berbasis komunitas. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Global Compact for Migration (GCM), khususnya terkait reintegrasi bermartabat dan berkelanjutan (Chetail, 2020). Dengan pendekatan ini, program diharapkan tidak hanya membantu pekerja migran memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan mereka secara jangka panjang. Orientasi pemberdayaan ini menjadi dasar dalam merancang kegiatan program di lapangan.

Bentuk intervensi utama dalam program meliputi pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, dan rehabilitasi sosial. Pelatihan keterampilan disesuaikan dengan minat dan latar belakang peserta, seperti pelatihan tata boga, menjahit, pertanian organik, dan *digital*

marketing. Dukungan UMKM diberikan dalam bentuk modal usaha kecil, pendampingan bisnis, serta fasilitasi pemasaran produk. Sementara itu, rehabilitasi sosial mencakup layanan konseling psikososial, penguatan relasi keluarga, dan reintegrasi komunitas. Strategi intervensi ini dirancang untuk mencakup dimensi ekonomi dan sosial secara bersamaan (Wati, 2023).

Aktor pelaksana program terdiri dari lintas sektor, yang mencerminkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Tenaga Kerja menjadi pemangku utama program bersama Baznas sebagai penyedia pendanaan berbasis dana zakat. Selain itu, organisasi masyarakat sipil seperti Seruni dan Mitra Sehati berperan dalam pendampingan psikososial dan advokasi hak pekerja migran (Wati, 2023). Keterlibatan sektor swasta dalam pelatihan keterampilan juga memperkuat hubungan antara pasar kerja lokal dan kebutuhan pekerja migran. Model pelibatan multi-aktor ini memperkuat legitimasi dan efektivitas program secara institusional (Yulianti et al., 2024).

Dari sisi pelaksanaan, program memiliki mekanisme implementasi yang relatif sistematis, dimulai dari tahap rekrutmen peserta hingga tahap *monitoring*. Rekrutmen dilakukan melalui pendataan pekerja migran purna oleh desa dan kecamatan, dengan koordinasi bersama Disnakertrans Kabupaten Banyumas. Setelah seleksi, peserta mengikuti pelatihan selama 1–2 bulan dan mendapatkan pendampingan selama enam bulan dalam menjalankan usaha atau reintegrasi sosial. Pembiayaan program sebagian besar bersumber dari APBD, zakat produktif Baznas, serta dana CSR perusahaan lokal. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Namun demikian, beberapa tantangan dalam implementasi masih ditemukan, terutama terkait minimnya partisipasi pekerja migran non-prosedural. Mereka umumnya tidak terdata secara resmi dan merasa enggan mengikuti program karena pengalaman migrasi mereka yang tidak legal (Longgarini et al., 2023). Selain itu, keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga menghambat keberlanjutan program. Sosialisasi yang belum merata menyebabkan banyak pekerja migran purna tidak mengetahui keberadaan dan manfaat program ini. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan aspek inklusivitas dalam desain dan pelaksanaan program.

Meskipun demikian, capaian program menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasakan manfaat dari pelatihan dan dukungan usaha yang diberikan. Beberapa peserta berhasil mengembangkan usaha rumahan dan meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan. Di sisi lain, rehabilitasi sosial memberikan ruang aman untuk pekerja migran yang mengalami trauma kerja. Dukungan ini penting untuk mengembalikan kepercayaan diri dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Evaluasi sementara menunjukkan potensi besar program dalam mendukung reintegrasi bermartabat jika didukung secara berkelanjutan (Sembiring & Agustin, 2023). Mekanisme berbasis komunitas, pelibatan banyak aktor, dan pendekatan multisektoral menjadi ciri khas yang membedakannya dari program-program reintegrasi di level nasional. Oleh karena itu, program ini menjadi studi kasus penting dalam memahami bagaimana norma global diterjemahkan dan dimaknai di level subnasional. Hal ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai dinamika hubungan internasional dari perspektif lokal (Hollifield et al., 2022).

Evaluasi Efektivitas Program Banyumas Sejahtera

Evaluasi efektivitas Program Banyumas Sejahtera dimulai dari analisis aspek input, mencakup sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program. Anggaran utama berasal dari APBD Kabupaten Banyumas, zakat produktif dari Baznas, serta kontribusi dana CSR dari sektor swasta lokal (Wati, 2023). Selain dana, input juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia, terutama tenaga pendamping dari Disnakertrans, LSM, dan fasilitator

pelatihan. Namun, kapasitas SDM di tingkat desa masih terbatas, yang berdampak pada kualitas pendampingan. Selain itu, belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur reintegrasi pekerja migran menjadi kendala kelembagaan (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Dalam aspek proses, Program Banyumas Sejahtera menunjukkan pola tata kelola kolaboratif antarinstansi, namun masih menghadapi tantangan koordinasi. Dinas Tenaga Kerja sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan Baznas, LSM, dan pemerintah desa dalam mendata, merekrut, dan membina peserta. Walau mekanisme koordinasi sudah berjalan melalui forum lintas sektoral, namun belum terdapat sistem terpadu untuk berbagi data pekerja migran secara *real-time*. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih dalam rekrutmen dan pelaporan program. Di sisi lain, belum semua desa memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk menjalankan fungsi monitoring (Seftiani et al., 2024).

Output program mencerminkan berbagai bentuk intervensi yang telah dilaksanakan kepada penerima manfaat. Pada tahun 2022, tercatat 300 peserta mengikuti pelatihan keterampilan seperti tata boga, pertanian organik, dan desain grafis digital. Selain itu, sebanyak 120 peserta menerima bantuan modal usaha mikro, sementara 80 lainnya mendapat pendampingan rehabilitasi sosial. Jumlah ini menunjukkan keterbatasan jangkauan dibanding dengan estimasi jumlah migran purna Banyumas yang mencapai ribuan per tahun. Artinya, program masih perlu perluasan skala untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Dampak program terhadap outcome terlihat pada peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi sebagian peserta, khususnya mereka yang terlibat aktif dalam pelatihan dan pendampingan usaha. Beberapa peserta menunjukkan peningkatan pendapatan rumah tangga melalui usaha mandiri seperti katering rumahan dan pertanian skala kecil. Secara psikososial, rehabilitasi sosial membantu peserta memulihkan kepercayaan diri dan mengurangi beban emosional pasca-migrasi. Namun, dampak ini belum merata, terutama pada kelompok yang kurang terjangkau atau mengalami hambatan partisipasi. Evaluasi dampak juga belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Keterlibatan pekerja migran prosedural dan non-prosedural dalam program menunjukkan disparitas yang cukup mencolok. Peserta dari jalur migrasi prosedural lebih banyak terlibat karena mereka tercatat secara resmi dan lebih mudah dijangkau oleh pemerintah. Sebaliknya, migran non-prosedural kerap enggan mengikuti program akibat trauma migrasi ilegal dan ketidakpercayaan terhadap otoritas. Rendahnya literasi program di kalangan migran non-prosedural juga menyebabkan mereka tidak mengetahui hak atau akses layanan reintegrasi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam memastikan inklusivitas program (Longgarini et al., 2023).

Dari sisi efisiensi, Program Banyumas Sejahtera menunjukkan rasio biaya terhadap hasil yang relatif seimbang pada intervensi skala kecil. Namun dalam konteks jangkauan yang lebih luas, ketergantungan pada dana non-APBD seperti zakat dan CSR memunculkan kerentanan pемbiayaan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan cenderung padat tenaga dan waktu, sementara insentif bagi pelaksana belum optimal. Efisiensi juga terganggu oleh duplikasi data dan lemahnya sistem digitalisasi pelaporan antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan perencanaan berbasis data menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi program (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Keberlanjutan program menjadi aspek penting dalam evaluasi, mengingat program ini masih bersifat proyek jangka pendek dengan pendanaan tahunan yang tidak pasti. Tidak adanya regulasi daerah atau peraturan bupati yang menetapkan program ini sebagai bagian dari kebijakan tetap menjadikannya rentan terhadap perubahan politik lokal. Selain itu, ketergantungan pada aktor eksternal seperti LSM dan donor lokal menimbulkan risiko keberlangsungan apabila dukungan tersebut terhenti. Belum ada strategi *exit* atau

pengarusutamaan program ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kondisi ini menunjukkan perlunya institusionalisasi program secara formal dan berkelanjutan (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Secara keseluruhan, evaluasi Program Banyumas Sejahtera melalui pendekatan IPOO menunjukkan adanya potensi besar, namun juga sejumlah hambatan dalam efektivitas pelaksanaannya. Ketersediaan input yang terbatas dan proses implementasi yang belum optimal berpengaruh pada keterbatasan output dan outcome yang dihasilkan. Partisipasi kelompok rentan seperti migran non-prosedural menjadi indikator penting dalam mengukur keadilan sosial program. Efisiensi dan keberlanjutan perlu diperkuat melalui perencanaan anggaran yang lebih pasti dan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. Dengan pembenahan tersebut, program ini dapat menjadi model lokalisasi norma global yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal (Hollifield et al., 2022).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja internasional yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 10.000 warga sebagai pekerja migran, dengan dominasi perempuan berusia produktif (BP3MI Jawa Tengah, 2024). Negara tujuan utama meliputi Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong, dengan sektor pekerjaan terbesar adalah domestik, pertanian, dan perawatan lansia. Tingginya angka migrasi ini tidak hanya didorong oleh minimnya lapangan kerja.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah dengan tingkat migrasi tenaga kerja internasional yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 10.000 warga sebagai pekerja migran, dengan dominasi perempuan berusia produktif (BP3MI Jawa Tengah, 2024). Negara tujuan utama meliputi Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong, dengan sektor pekerjaan terbesar adalah domestik, pertanian, dan perawatan lansia. Tingginya angka migrasi ini tidak hanya didorong oleh minimnya lapangan kerja lokal, tetapi juga oleh jaringan sosial dan praktik migrasi turun-temurun dalam komunitas pedesaan (Wicaksono, 2019).

Analisis Lokalisasi Norma Global

Salah satu indikator utama dalam menilai keterkaitan program lokal dengan norma global adalah sejauh mana prinsip-prinsip internasional direfleksikan dalam desain dan pelaksanaan kebijakan. Program Banyumas Sejahtera secara umum telah menunjukkan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dalam *Global Compact for Migration* (GCM), khususnya Objective 21 yang menekankan pentingnya *safe and dignified return and sustainable reintegration*. Elemen pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, dan rehabilitasi sosial dapat dibaca sebagai bentuk implementasi nilai reintegrasi yang bermartabat. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan aktor lokal juga mencerminkan prinsip “*community-based reintegration*” sebagaimana disarankan oleh International Organization for Migration (IOM, 2021). Meskipun demikian, refleksi norma global ini belum sepenuhnya utuh dan masih bersifat parsial dalam beberapa aspek.

Salah satu prinsip utama GCM adalah jaminan terhadap keselamatan dan martabat (*dignity*) pekerja migran pasca-kepulangan. Dalam konteks Program Banyumas Sejahtera, prinsip ini tercermin melalui upaya memberikan dukungan psikososial dan konseling trauma bagi pekerja migran yang mengalami kekerasan atau tekanan mental selama di luar negeri. Kegiatan ini relevan dengan *ILO Guidelines on Fair Recruitment and Reintegration* yang menyerukan adanya pemulihuan psikologis sebagai bagian dari proses reintegrasi (ILO, 2019). Namun, cakupan layanan ini masih terbatas pada kelompok migran prosedural, sementara migran non-prosedural belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan nondiskriminasi masih menjadi tantangan dalam adaptasi norma.

Bentuk modifikasi norma juga terlihat dalam cara program ini menyesuaikan konsep reintegrasi global ke dalam konteks kultural dan kelembagaan lokal. Misalnya, penggunaan dana zakat melalui Baznas Kabupaten Banyumas sebagai sumber pembiayaan reintegrasi merupakan bentuk inovasi lokal yang tidak ditemukan dalam desain global GCM atau ILO. Hal ini mencerminkan *cultural re-framing*, yaitu ketika norma global diterjemahkan ke dalam bentuk yang diterima oleh komunitas lokal tanpa kehilangan esensi nilai (Acharya, 2016). Dalam kerangka *norm localization*, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk *pragmatic adaptation* terhadap kondisi lokal. Adaptasi ini sekaligus memperkuat legitimasi sosial program di mata masyarakat penerima manfaat.

Namun, proses lokalisasi ini juga tidak lepas dari resistensi. Beberapa aktor lokal menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kerangka global yang dianggap terlalu abstrak atau tidak relevan dengan kebutuhan desa. Selain itu, keterbatasan pengetahuan teknis dan sumber daya juga menjadi faktor penghambat internalisasi prinsip-prinsip global secara utuh (Hollifield et al., 2022). Resistensi ini dapat dibaca sebagai bentuk *selective localization*, di mana hanya sebagian norma yang diserap sesuai kepentingan dan kapasitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk melihat proses lokalisasi tidak hanya sebagai penerimaan pasif, tetapi juga negosiasi aktif oleh aktor lokal.

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik dan narasi aktor program, dapat disimpulkan bahwa proses yang terjadi lebih dekat pada model *bottom-up localization* dibanding *top-down implementation*. Pemerintah daerah dan mitra masyarakat sipil tidak sekadar mengadopsi norma dari pusat atau lembaga internasional, tetapi secara aktif menyesuaikan dan merumuskan bentuk intervensi berdasarkan kebutuhan komunitas. Hal ini sejalan dengan konsep *norm translation*, yaitu proses ketika aktor lokal menginterpretasi ulang norma global agar selaras dengan realitas sosial dan budaya setempat (Acharya, 2016). Dengan demikian, program ini tidak dapat dikategorikan sebagai *copy-paste* norma internasional, melainkan hasil transformasi melalui interaksi lokal-global yang dinamis. Proses ini memperlihatkan pentingnya kapasitas agensi lokal dalam tata kelola migrasi.

Salah satu aspek menarik dalam lokalisasi norma adalah bagaimana aktor lokal menggunakan bahasa dan narasi global untuk memperkuat legitimasi program. Istilah “reintegrasi bermartabat” dan “kemandirian ekonomi” sering digunakan dalam dokumen kebijakan lokal maupun dalam wawancara dengan pejabat daerah. Narasi ini menunjukkan bahwa norma global tidak hanya diterjemahkan secara teknis, tetapi juga diinternalisasi dalam wacana lokal (Bernstein et al., 2025). Penggunaan narasi global ini juga berfungsi sebagai alat advokasi dan pemberian politik untuk mendukung keberlanjutan program. Ini memperlihatkan bahwa norma global memiliki fungsi simbolik sekaligus strategis dalam konteks kebijakan lokal.

Akan tetapi, efektivitas lokalisasi norma sangat bergantung pada struktur institusional dan politik lokal yang mendukung. Program Banyumas Sejahtera relatif berhasil karena adanya sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan masyarakat sipil yang saling melengkapi dalam sumber daya dan fungsi. Dalam konteks inilah, norma global menjadi *tool of convergence* antara kebutuhan lokal dan komitmen internasional terhadap tata kelola migrasi yang berkeadilan (OECD, 2017). Jika mekanisme kelembagaan ini tidak terjaga, maka adaptasi norma global dapat terhenti pada level simbolik saja. Oleh sebab itu, keberlanjutan kelembagaan menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan proses lokalisasi.

Secara keseluruhan, analisis lokalisasi norma global dalam Program Banyumas Sejahtera menunjukkan bahwa adaptasi norma tidak terjadi secara linear, melainkan melalui proses selektif, adaptif, dan kontekstual. Intervensi program yang mencerminkan nilai-nilai GCM, ILO, dan SDG 10.7 menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki kapasitas untuk menjadi *norm entrepreneur*. Dengan memahami konteks lokal, mereka mampu menerjemahkan norma global ke dalam bentuk kebijakan yang lebih relevan dan operasional. Temuan ini mendukung

literatur hubungan internasional kontemporer yang menekankan pentingnya peran aktor subnasional dalam menyebarkan norma global (Risse et al., 2013). Dengan demikian, lokalisasi norma dalam konteks ini bukanlah bentuk subordinasi, tetapi ekspresi dari agensi lokal dalam tata kelola global.

Evaluasi efektivitas Program Banyumas Sejahtera dimulai dari analisis aspek input, mencakup sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program. Anggaran utama berasal dari APBD Kabupaten Banyumas, zakat produktif dari Baznas, serta kontribusi dana CSR dari sektor swasta lokal (Wati, 2023). Selain dana, input juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia, terutama tenaga pendamping dari Disnakertrans, LSM, dan fasilitator pelatihan. Namun, kapasitas SDM di tingkat desa masih terbatas, yang berdampak pada kualitas pendampingan. Selain itu, belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur reintegrasi pekerja migran menjadi kendala kelembagaan (Disnakertrans Kab. Banyumas, personal communication, July 2025).

Tantangan dan Peluang Integrasi Global-Lokal

Salah satu tantangan utama dalam integrasi norma global ke dalam kebijakan lokal seperti Program Banyumas Sejahtera adalah fragmentasi kelembagaan. Meskipun ada kolaborasi antarinstansi, koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta seringkali belum berjalan efektif. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang baku menyebabkan tumpang tindih peran dan lemahnya pemantauan program. Hal ini menghambat efisiensi implementasi dan melemahkan kesinambungan antar fase kegiatan (OECD, 2017). Tanpa tata kelola kelembagaan yang solid, adaptasi norma global cenderung bersifat parsial dan rentan stagnasi.

Minimnya data pekerja migran non-prosedural juga menjadi hambatan signifikan dalam perencanaan dan evaluasi program. Kelompok ini sering tidak tercatat dalam sistem resmi dan enggan berpartisipasi karena pengalaman migrasi yang tidak terdokumentasi atau melanggar prosedur. Akibatnya, intervensi pemerintah tidak menjangkau kelompok rentan ini, padahal mereka termasuk yang paling membutuhkan perlindungan dan dukungan reintegrasi (IOM, 2021). Ketidakjelasan data membuat kebijakan menjadi bias terhadap migran prosedural dan kurang inklusif secara sosial. Masalah ini memperkuat argumen bahwa perlunya pendekatan data yang sensitif terhadap kompleksitas realitas migrasi di tingkat lokal.

Pendanaan yang terbatas juga menjadi kendala struktural dalam pelaksanaan Program Banyumas Sejahtera. Anggaran yang bersumber dari APBD dan dana zakat produktif memiliki keterbatasan dalam jangkauan dan keberlanjutan program. Tanpa skema pembiayaan jangka panjang atau dukungan dari pemerintah pusat, pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah (Setiawan et al., 2022). Ketiadaan kerangka pembiayaan kolaboratif antarlevel pemerintahan juga memperlemah kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi normatif sebagai aktor lokal-global. Oleh karena itu, desain keuangan yang responsif terhadap tantangan reintegrasi sangat dibutuhkan.

Selain kendala fiskal, bias gender masih mewarnai sebagian praktik program. Meskipun mayoritas pekerja migran asal Banyumas adalah perempuan, perencanaan kegiatan masih dominan berbasis model ekonomi laki-laki (Wadi, 2024). Dukungan terhadap perempuan pekerja migran dalam bentuk pelatihan domestik atau usaha rumahan seringkali memperkuat stereotip peran gender tradisional. Sementara kebutuhan perempuan seperti konseling trauma, pengasuhan anak, dan perlindungan hukum belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam merancang program reintegrasi yang inklusif dan adil.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah peluang yang dapat memperkuat integrasi norma global ke dalam kebijakan lokal. Salah satunya adalah inovasi kelembagaan di tingkat lokal

yang memungkinkan eksperimen kebijakan berbasis komunitas. Penggunaan zakat sebagai sumber pembiayaan reintegrasi dan libatkan LSM lokal dalam pendampingan sosial adalah contoh adaptasi kreatif terhadap konteks lokal. Inovasi ini menunjukkan bahwa aktor lokal mampu merespons tantangan global dengan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan (Bernstein et al., 2025). Potensi ini perlu dikembangkan melalui fasilitasi pengetahuan dan jejaring antar daerah.

Peran komunitas juga menjadi kekuatan dalam mendukung keberhasilan program reintegrasi. Keterlibatan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan alumni migran dalam mendampingi peserta menciptakan ekosistem sosial yang mendukung transisi pasca-kepulangan. Solidaritas sosial dan pendekatan bottom-up ini memperkuat rasa memiliki terhadap program dan memperluas jangkauan layanan. Mekanisme partisipatif ini juga memperkuat aspek *“dignified return”* sebagaimana ditekankan dalam GCM Objective 21 (IOM, 2021). Dengan memberdayakan komunitas, integrasi norma global tidak hanya bersifat struktural tetapi juga kultural.

Kapabilitas pemerintah daerah sebagai *norm entrepreneur* juga merupakan potensi besar dalam diplomasi migrasi. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membuktikan bahwa aktor subnasional mampu mengembangkan program yang merefleksikan norma global dan menjawab kebutuhan lokal secara bersamaan. Peran ini menunjukkan bahwa desentralisasi bukan sekadar devolusi administratif, melainkan juga ruang untuk inovasi normatif dalam tata kelola global (Acharya, 2016). Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menjadi aktor penting dalam jaringan internasional yang lebih luas. Jika diperkuat, pemerintah lokal dapat memainkan peran strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan migrasi yang berkeadilan.

Akhirnya, integrasi global-lokal dalam Program Banyumas Sejahtera memperlihatkan dinamika antara hambatan struktural dan peluang institusional yang saling memengaruhi. Tantangan seperti keterbatasan data, anggaran, dan bias kelembagaan perlu diatasi dengan reformasi kebijakan dan tata kelola yang lebih inklusif. Sementara itu, potensi inovasi lokal dan peran komunitas membuka ruang bagi penguatan praktik norm localization secara berkelanjutan. Dengan mengakui dan memperkuat kapasitas subnasional, tata kelola migrasi dapat bergerak menuju model yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan riil migran purna. Model seperti ini relevan untuk dikembangkan sebagai bagian dari implementasi GCM dan SDGs di tingkat akar rumput.

Salah satu indikator utama dalam menilai keterkaitan program lokal dengan norma global adalah sejauh mana prinsip-prinsip internasional direfleksikan dalam desain dan pelaksanaan kebijakan. Program Banyumas Sejahtera secara umum telah menunjukkan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dalam *Global Compact for Migration* (GCM), khususnya Objective 21 yang menekankan pentingnya *safe and dignified return and sustainable reintegration*. Elemen pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, dan rehabilitasi sosial dapat dibaca sebagai bentuk implementasi nilai reintegrasi yang bermartabat. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan aktor lokal juga mencerminkan prinsip *“community-based reintegration”* sebagaimana disarankan oleh International Organization for Migration (IOM, 2021). Meskipun demikian, refleksi norma global ini belum sepenuhnya utuh dan masih bersifat parsial dalam beberapa aspek.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Banyumas Sejahtera merupakan bentuk adaptasi norma global mengenai reintegrasi pekerja migran, khususnya sebagaimana diatur dalam *Global Compact for Migration* (GCM) Objective 21 dan SDG 10.7, ke dalam konteks

lokal Kabupaten Banyumas. Program ini berhasil mengimplementasikan intervensi berbasis komunitas yang mencakup pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, dan rehabilitasi sosial, sehingga memberikan dampak positif pada kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial sebagian peserta. Namun, efektivitas program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi pekerja migran non-prosedural, dan koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Analisis dengan kerangka IPOO menunjukkan bahwa kekuatan program terletak pada desain intervensi dan kolaborasi multi-aktor, sementara kelemahan terletak pada tata kelola dan keberlanjutan pendanaan. Secara keseluruhan, program ini menjadi contoh relevan dari praktik *norm localization* yang berpotensi direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian kontekstual.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembentukan mekanisme kerja terpadu yang melibatkan pemerintah desa, LSM, sektor swasta, dan komunitas migran. Peningkatan pendanaan jangka panjang dapat dilakukan dengan memadukan sumber APBD, dana zakat produktif, CSR, dan potensi dukungan dari pemerintah pusat. Perlu ada sistem pendataan komprehensif yang mencakup pekerja migran prosedural maupun non-prosedural, sehingga intervensi menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran. Selain itu, integrasi perspektif gender perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik perempuan migran, termasuk dukungan psikososial dan perlindungan hukum, dapat terpenuhi secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, Program Banyumas Sejahtera berpotensi menjadi model unggulan dalam diplomasi migrasi subnasional dan implementasi norma global di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (Ed.). (2016). *Why Govern?: Rethinking Demand and Progress in Global Governance*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316756829>
- Aini, H. S. (2024). Phenomenology Studies in Public Policy Analysis. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 5(2), 195–208. <https://doi.org/10.20473/jgar.v5i2.53729>
- Bernstein, S., Glas, A., & Laurence, M. (2025). *Norms, Practices, and Social Change in Global Politics*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/9781009560986>
- BP3MI Jawa Tengah. (2024). Penempatan Pekerja Migran Indonesia Asal Jateng Tahun 2018-2024. *Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah*. <https://jateng.bp2mi.go.id/wp-content/uploads/2024/04/Penempatan-PMI-Jateng.pdf>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024, Mei). Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2022-2023. *Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- Chetail, V. (2020). The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: A kaleidoscope of international law. *International Journal of Law in Context*, 16(3), 253–268. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S1744552320000300>
- Cholewinski, R. (2015). Evaluating Bilateral Labour Migration Agreements in the Light of Human and Labour Rights. In M. Panizzon, G. Zürcher, & E. Fornalé (Eds.), *The Palgrave Handbook of International Labour Migration: Law and Policy Perspectives* (pp. 231–252). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137352217_10
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

- Disnakertrans Kab. Banyumas. (2025, July). *Program Banyumas Sejahtera* [Personal communication].
- Hollifield, J. F., Martin, P. L., Orrenius, P. M., & Héran, F. (2022). *Controlling Immigration: A Comparative Perspective, Fourth Edition* (4th ed.). American Political Science Association (APSA). <https://www.sup.org/books/politics/controlling-immigration>
- ILO. (2019). Efective Return and Reintegration of Migrant Workers with Special Focus on ASEAN Member States. *International Labour Organizations*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-bangkok/documents/publication/wcms_733917.pdf
- ILO. (2024, October 12). Fair Recruitment for Decent Work: A Dialogue on Promising Practices in the Western Hemisphere. *International Labour Organizations*. <https://www.ilo.org/resource/news/fair-recruitment-decent-work-dialogue-promising-practices-western>
- IOM. (2021). Handbook on Migration and Sustainable Development. *International Organization of Migration*.
- Levitt, P., & Schiller, N. G. (2020). Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society1. *International Migration Review*, 38(3), 1002–1039. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>
- OECD. (2017). *Interrelations between Public Policies, Migration and Development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264265615-en>
- Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (Eds.). (2013). *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>
- Seftiani, S., Vibriyanti, D., Ningrum, V., Hidayati, I., & Katherina, L. K. (2024). Peran Kelembagaan Lokal dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 369–381. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i2.77739>
- Sembiring, R. A., & Agustin, M. (2023). Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1478>
- Setiadi. (2021). *Masalah Reintegrasi Sosial dan Ekonomi Migran Kembali*.
- Setiawan, Y., Furqon, A. C., Yanwar, Suwadji, Y. T., & Muhyiddin. (2022). Peta Jalan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. <https://pusbangjak.kemnaker.go.id/publication-details/peta>
- Wadi, H. (2024). *Kedudukan Perempuan Migran dalam Pandangan Islam dan Kesetaraan Gender (Studi Pada Buruh Migran Perempuan di Desa Pengenjek)*.
- Wagle, U. R. (2024). Labor migration, remittances, and the economy in the Gulf Cooperation Council region. *Comparative Migration Studies*, 12(1), 30. <https://doi.org/10.1186/s40878-024-00390-3>
- Wati, F. S. (2023). *Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera pada Baznas Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* [UIN Prof. KH. Saifuddinzuhr]. https://repository.uinsaizu.ac.id/21990/1/Fitri%20Saras%20Wati_Optimalisasi%20Program%20Banyumas%20Sejahtera%20Pada%20BAZNAS%20Kabupaten%20Banyumas%20Terhadap%20kesejahteraan%20Masyarakat.pdf

- Wicaksono, M. (2019, Mei). Minim Kesempatan di Dalam Negeri, Pekerja Migran asal Banyumas Meningkat. *Kompas*.
<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/10/minim-kesempatan-di-dalam-negeri-pekerja-migran-asal-banyumas-meningkat>
- Wickramasekara, P. (2019). Effective Return and Reintegration of Migrant Workers With Special Focus on ASEAN Member States. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3579358>
- Wuryandari, R. D. (2022). Perempuan dan Penerapan Etika Feminis dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1), 1–10.
<https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.111>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Yulianti, D., Girhan, G., Aprilia, H., Unsayain, H., & Wijayanti, I. (2024). Strategi Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia di Lombok: Proses Adaptasi Pasca Kepulangan ke Wilayah Asal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 337–348.
<https://doi.org/10.57248/jishum.v3i2.535>
- Zhang, J., & Chung, K. S. K. (2024). Online naturalistic inquiry for stakeholder issue analysis: Design and implementation. *Project Leadership and Society*, 5, 100163.
<https://doi.org/10.1016/j.plas.2024.100163>